

IDENTIFIKASI PROPAGANDA ORGANISASI PAPUA MERDEKA: UPAYA PREVENTIF DISINTEGRASI BANGSA

FREE PAPUA PROPAGANDA IDENTIFICATION: NATIONAL DISINTEGRATION PREVENTION EFFORTS

Ali Kusno¹, Sailal Arimi², M. Hafidh Wahidias³

KANTOR BAHASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, UNIVERSITAS GAJAH MADA,
TNI ANGKATAN DARAT

(alikusnolambung@gmail.com, sailal_arimi@ugm.ac.id, mohammadhw751@gmail.com)

Abstrak – Aksi teror masih terus dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan cara pembakaran fasilitas umum dan beberapa aksi pembunuhan. Selain itu, upaya disintegrasi bangsa juga dilakukan melalui propaganda di media sosial. Apabila aksi-aksi tersebut tidak segera diatasi akan menjadi ancaman disintegrasi Papua dari Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi beragam propaganda Papua Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Data yang digunakan berupa unggahan di media sosial Facebook milik KKB Papua maupun simpatisan. Hasil penelitian menunjukkan pada tataran tekstual adanya beragam propaganda, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dianggap melakukan operasi secara terbuka, membentuk milisi, menyiksa rakyat Papua, kekerasan terhadap warga sipil, dan meneror tempat ibadah. Masyarakat Indonesia non-Papua dianggap melabeli masyarakat Papua dengan kata ‘monyet’/‘gorila’. Mahasiswa Papua di daerah ditindas. Kemerdekaan dianggap sebagai petunjuk Tuhan untuk membebaskan diri dari kolonialisme Indonesia. Upaya memerdekakan diri dengan membuat Undang-Undang Dasar (UUD) sementara, menolak produk hukum Indonesia. Perlunya desakan dan tuntutan referendum dan penghentian otonomi khusus. Praktik wacana level meso menunjukkan bahwa unggahan diproduksi secara pribadi oleh masing-masing pemilik akun. Pada tataran makro menunjukkan adanya kecemburuan sosial ekonomi terhadap para pendatang dan sentimen keagamaan. Teknik propaganda yang dominan digunakan KKB adalah *card stacking*, yakni menyajikan informasi yang tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta dengan menyudutkan pemerintah Indonesia. Teknik *name calling* dengan menstereotipe negatif segala hal tentang Indonesia. Penggunaan teknik *glittering generalities* dan *bandwagon* dengan menebarkan janji manis dan keyakinan tentang referendum dan kemerdekaan. Propaganda tersebut akan diterima begitu saja apabila tidak dilakukan kontra propaganda dengan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya masyarakat Papua. Untuk itu pentingnya memberikan edukasi dan penanaman rasa memiliki Indonesia sebagai kunci melawan aksi propaganda dan sparatisme yang dilakukan KKB Papua Merdeka bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat papua.

Kata Kunci: Indonesia, propaganda, wacana, Papua, sparatis.

Abstract – Acts of terror are still carried out by armed criminal groups (KKB) by burning public facilities and some acts of murder. In addition, efforts to disintegrate the nation are also carried out through propaganda on social media. If these actions are not addressed immediately, it will be a threat to the disintegration of Papua from Indonesia. This research aims to identify various propaganda of Free Papua. This research uses a critical discourse analysis approach. The data used is in the form of posts on Facebook social media owned by KKB Papua and sympathizers. The results showed that at the textual level there was a variety of propaganda, such as the Indonesian National

Army (TNI)-Police of the Republic of Indonesia (Polri) is considered to conduct operations openly, form militias, torture the Papuan people, violence against civilians, and terrorize places of worship. Non-Papuan Indonesians are considered to label Papuans with the word 'monkey'/gorilla. Papuan students in the area were oppressed. Efforts to liberate themselves by making a temporary Constitution (UUD), rejecting Indonesian legal products. The need for the insistence and demands of a referendum and the cessation of special autonomy. Meso-level discourse practices show that uploads are personally produced by each account owner. At the macro level, there is socio-economic jealousy towards migrants and religious sentiments. The dominant propaganda technique used by KKB is card stacking, which presents unfounded information and distorts facts by cornering the Indonesian government. Name-calling technique by stereotyping negative everything about Indonesia. The use of glittering generalities and bandwagon techniques sows sweet promises and beliefs about referendums and independence. The propaganda will be taken for granted if counter-propaganda is not carried out by providing correct and reliable information from the Papuan people. For this reason, it is important to provide education and cultivation of Indonesia's sense of belonging as the key to fighting propaganda and separatism carried out by the Free Papua KKB for the people of Indonesia, especially the people of Papua.

Keywords: Indonesia, propaganda, discourse, Papua, separatist

Pendahuluan

Tiga prajurit TNI gugur ditembak KKB dan satu anggota TNI lainnya dinyatakan kritis. Ketiga prajurit yang tewas ditembak KKB tersebut diserang pada saat sedang berjaga di Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408/Sbh (Aditya, 2022). Dua kasus tersebut menambah panjang deretan daftar nama aparat yang gugur melaksanakan tugas di Papua. Konflik di Papua seolah menjadi konflik yang tidak berkesudahan. Kasus terbaru Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu, 5 Februari 2022. Seorang personel Satgas Kodim Yonif PR 328/DGH Prada Giyade Ramadhani

Fattah yang bertugas di Pos TNI Titigi, terluka akibat terkena tembakan di bagian kaki (Suwandi, 2022).

Saat ini eksalasi konflik Papua masih saja terjadi penembakan terhadap aparat dan warga sipil. Baku tembak antara KKB Papua dan aparat TNI/Polri sering terjadi. Aksi penembakan, pembakaran fasilitas umum, dan pengusiran warga sering dilakukan KKB Papua Merdeka. Terbaru, KKB Papua Merdeka di bawah pimpinan Undius Kogoya membakar gedung dua sekolah di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Rabu 30 Maret 2022. Kedua sekolah yang dibakar adalah SD Yayasan Pendidikan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (YPPGI) dan SMP Negeri 2 Hitadipa (Costa, 2022).

Kejadian-kejadian tersebut menambah panjang rangkaian konflik Papua. Berdasarkan catatan sejarah, konflik berawal 1961 muncul keinginan Belanda membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. Freddy (“Luncurkan Buku, Freddy Numberi Kritisi Cara Tangani Papua,” 2014) menyebut ketertarikan AS pada Papua semakin kuat pada tahun 1961 saat muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekati diri pada negara komunis terutama Uni Soviet yang membuat takut Presiden John F. Kennedy.

Pada bulan Desember 1949, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda dengan pengecualian dari Papua bagian barat, dan Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani Perjanjian New York, yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. Belanda mensyaratkan Indonesia harus memberikan kesempatan pada rakyat

Papua untuk referendum yakni Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA. Melalui PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hasil PERPERA tersebut melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi teror. Hal itu ditindak tegas oleh aparat keamanan karena dapat dikategorikan tindakan makar. Aparat dituduh melakukan tindakan represif terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia dan wujud simpatisan Organisasi Papua Merdeka (Konflik Papua, 2020).

Saat ini wilayah Papua yang sering bergejolak berada di Kabupaten Intan Jaya. Terkait konflik di pegunungan tengah, Peneliti Papua dari LIPI, Adriana Elizabeth, mengatakan permasalahan Intan Jaya merupakan bagian dari permasalahan kompleks. Akar masalah di Intan Jaya adalah upaya eksploitasi sumber daya alam.

Jaleswari Pramowardhani Deputy V Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa pemerintah tidak ada kompromi

dengan KKB Papua Merdeka. Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan terus memberikan perlindungan maksimal bagi segenap warga negara, termasuk masyarakat di Kabupaten Intan Jaya dari ancaman KKB. Selain upaya keamanan, pemerintah pusat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Otonomi khusus yang sudah berjalan selama ini, akan terus dilanjutkan melalui perbaikan UU Otonomi Khusus Papua yang prosesnya sedang berlangsung (Taher, 2021). Pemberian otonomi khusus kepada Papua perlu dilihat sebagai pengistimewaan yang diberikan pemerintah pusat.

Berbagai upaya pendekatan kesejahteraan tidak menyurutkan aksi yang dilakukan KKB Papua Merdeka. Selain melakukan aksi teror, KKB Papua Merdeka juga melakukan propaganda di media sosial. Banyak ditemukan akun Facebook yang gencar melakukan propaganda. Propaganda itu dianggap sebagai sebuah kebenaran bagi masyarakat Papua yang berbahaya karena merusak citra Indonesia di dunia internasional. Gencarnya aksi kekerasan bersenjata dan propaganda KKB Papua Merdeka dapat merongrong keamanan

nasional dan menjadi acuan disintegrasi bangsa Indonesia. Pengalaman lepasnya Timor Timur dari pangkuan NKRI selayaknya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengungkapkan wacana propaganda KKB Papua Merdeka yang banyak tersebar di media sosial Facebook. Kajian berupa identifikasi ragam propaganda yang digaungkan oleh KKB Papua Merdeka penting untuk dilakukan. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar bagi para penegak hukum dalam menertibkan berbagai propaganda yang beredar di media sosial. Selain itu, identifikasi propaganda KKB Papua Merdeka akan membantu aparat keamanan melakukan kontrapropaganda melawan stigma propaganda yang dilancarkan KKB Papua Merdeka.

Tinjauan Pustaka

Penelitian muatan propaganda KKB Papua Merdeka menggunakan analisis wacana. Studi wacana merupakan analisis pada semua aspek penggunaan bahasa (Schiffrin, 2007: 40). Wacana merupakan praktik sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan,

tulisan, kial, gambar, diagram, film atau musik (N. Fairclough dalam Haryatmoko, 2016: 4).

Dalam analisis penggunaan bahasa mencakup analisis tentang tujuan dan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia (Schiffrin, 2007: 41). Melalui bahasa tujuan dan fungsi penggunaannya dapat diidentifikasi. Wacana dalam unggahan media sosial Facebook KKB Papua Merdeka banyak bermuatan propaganda. Propaganda dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V* dimaknai sebagai penyebarluasan pesan yang berupa pemahaman, pendapat dan sebagainya yang benar maupun salah bertujuan untuk meyakinkan khalayak agar menganut aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Sebuah propaganda dalam penyampaiannya memuat janji-janji berlebihan yang membuai khalayak umum (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

Dan Nimmo mengulas tujuh teknik propaganda untuk tujuan persuasif dengan menggunakan kombinasi kata, tindakan, dan logika (Zakiyuddin, 2018:45-46), yakni teknik pelabelan buruk (*name calling*), teknik kata-kata yang baik (*glittering generalities*), teknik lambang otoritas (*transfer*), teknik pernyataan orang yang dihormati

(*testimonial*), teknik representasi khalayak (*plain folks*), teknik pernyataan yang akurat dan tidak akurat, logis dan tidak logis serta sebagainya untuk membangun suatu kasus (*card stacking*), dan teknik meyakinkan khalayak tentang kebenaran agar setiap orang mengikuti (*bandwagon*). Dalam perkembangan saat ini, propaganda semakin menemukan momentumnya seiring dengan berkembangnya media sosial sehingga dapat dilakukan dengan masif tanpa batasan dan mempersulit pengendalian.

Untuk mengidentifikasi muatan propaganda KKB Papua Merdeka dilakukan dengan dengan *Critical Discourse Analysis (CDA)* yang dikembangkan Norman Fairclough, ahli linguistik sosial. Melalui Analisis wacana kritis Model Fairclough dapat menempatkan wacana penggunaan bahasa sebagai praktik sosial yang dihasilkan melalui sebuah peristiwa diskursif dan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014: 255).

Dalam konteks penelitian ini, analisis wacana kritis Model Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa dalam berbagai unggahan Facebook tentang Papua Merdeka sebagai praktik sosial yang tidak bisa

dilepaskan dari konteks sosial budaya dan sejarah masyarakat Papua.

Analisis wacana kritis model Fairclough dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi, analisis mikro, meso, dan makro. Analisis tekstual (level mikro) berupa analisis deskriptif terhadap dimensi teks. Analisis praktik wacana (level meso) meliputi interpretasi terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsian, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas. Analisis sosiokultural (level makro) meliputi eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang mendasari kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014: 255). Analisis wacana kritis dengan tiga dimensi tersebut dapat mengungkap pemaknaan sebuah wacana unggahan dalam propaganda KKB Papua Merdeka dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan mendalam.

Beberapa kajian relevan dengan penelitian ini. Pertama, Makna Bahasa Propaganda dalam Wacana (Spanduk dan Baliho) Tuntutan Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur (Kajian Semiotik) (Kusno, 2015:48). Hasil kajian tersebut menunjukkan gagalnya propaganda dalam memprovokasi

masyarakat yang seolah tidak peduli. Masyarakat beranggapan bahwa yang dibutuhkan perbaikan pemerintahan agar dapat menggunakan APBD dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur, bukan otonomi khusus. Kegagalan tersebut karena karakter masyarakat Kalimantan Timur yang berpikiran terbuka sehingga tidak mudah digiring pemikirannya.

Kedua, penelitian Teknik-Teknik Propaganda Politik Jalaludin Rakhmat (Studi Kasus pada Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) (Zakiyuddin, 2018:39). Hasil penelitian menunjukkan Jalaluddin Rakhmat menggunakan berbagai teknik propaganda. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan dalam satu misi menggunakan berbagai teknik propaganda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 1994:6) untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa propaganda di media sosial yang dilakukan KKB Papua Merdeka dan simpatisan. Objek penelitian ini berupa propaganda KKB Papua Merdeka yang banyak tersebar di

Facebook. Data penelitian ini berupa dokumen unggahan organisasi maupun simpatisan Papua Merdeka di media sosial Facebook. Unggahan tersebut bersumber dari akun-akun yang teridentifikasi dikendalikan dari dalam maupun luar negeri. Apabila dilihat dari profil, diduga pengunggah merupakan simpatisan yang berasal dari orang asli Papua yang tinggal di luar negeri maupun orang asing yang bersimpati dengan gerakan Papua Merdeka. Untuk menjaga kerahasiaan pengunggah propaganda, pengunggah penulis ganti dengan inisial. Teknik analisa data propaganda KKB Papua Merdeka menggunakan model interaktif Hasil penelitian ini juga diverifikasi dengan melakukan diskusi dalam tim penulis, yakni ahli bahasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada, serta aparat TNI yang pernah bertugas di Papua dan mengerti seluk beluk konflik Papua. Pelibatan unsur penulis dari tiga perspektif ini diharapkan membuat analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Berikut ini analisis wacana kritis propaganda Kelompok Kriminal

Bersenjata Papua Merdeka (KKB Papua Merdeka) di Facebook.

Analisis Tekstual (Analisis Mikro)

Analisis tekstual dalam analisis Fairclough pada unggahan di Facebook KKB Papua Merdeka dan simpatisan dilakukan dengan analisis sebagai berikut:

1. Struktur Teks

Sebuah struktur teks secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Dalam unggahan Facebook KKB Papua Merdeka pada bagian pembuka menyajikan kekecewaan-kecewaan terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai penjajah. Selanjutnya, pada bagian penutup menyajikan provokasi Papua untuk merdeka. Khusus pada bagian isi, memuat beragam pernyataan yang dapat diidentifikasi pemaknaannya sebagai berikut.

Propaganda bahwa TNI-Polri Melakukan Operasi Secara Terbuka

Berikut ini penggalan unggahan KKB Papua Merdeka yang mengungkapkan propaganda tersebut.

(1) Hari ini tanggal 10 Agustus 2020, telah mendapatkan sebuah

Dokumen Rahasia Milik Pemerintah Indonesia melalui TNI POLRI di Wilayah Pengunungan Tengah Papua untuk Operasi militer Secarah Terbuka dan mengadu domba kan Orang Papua dengan Orang Papua (AkunTPNPB:<https://www.facebook.com/tpnpbkodapdeiyai>).

Dalam unggahan tersebut mengungkapkan bahwa KKB Papua Merdeka telah mendapatkan sebuah dokumen rahasia milik pemerintah Indonesia melalui TNI-POLRI di wilayah Pengunungan Tengah Papua yang akan melakukan operasi militer secara terbuka. Selain itu, KKB Papua Merdeka mempropagandakan bahwa ada agenda pemerintah Indonesia mengadu domba sesama orang Papua. Propaganda tersebut tidak menyertakan bukti fisik maupun sumber informasi. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan aparat TNI-Polri.

Propaganda TNI-POLRI Membentuk Milisi

Berikut ini penggalan unggahan KKB Papua Merdeka dan simpatisan yang mengungkapkan propaganda tersebut.

(1) Dalam Pemerintahan Presiden Republik Indonesia melalui TNI-POLRI mbentuk Kelompok Milisi Barisan Merah Putih di Senjatai secara Resmi.

Kebocoran Kegiatan negara tersebut di Laporkan oleh Papua Intelejen Servis (PIS) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) LAPAGO Pengunungan Tengah Papua yang di kerjakan secara tersembunyi oleh Militer kolonial indonesia TNI POLRI sedang Membagi Senjata Api Kepada Orang Asli West Papua.

Maka kami sampaikan kepada Masyarakat internasional dan Nasional Khususnya Rakyat Papua bahwa Timor- timur kedua akan terjadi di Papua karena banyak orang Papua yang sangat tidak Paham situasi buruk di Papua namun selalu utamakan Uang dan Jabatan

(AkunTPNPB:<https://www.facebook.com/tpnpbkodapdeiyai>).

Berdasarkan unggahan tersebut dipropagandakan bahwa pemerintahan Presiden Republik Indonesia melalui TNI-Polri membentuk Kelompok Milisi Barisan Merah Putih dipersenjatai secara resmi. Kebocoran kegiatan Indonesia tersebut dilaporkan oleh Papua Intelijen Servis (PIS) TPNPB wilayah Lapago Pengunungan Tengah Papua yang dilakukan secara tersembunyi oleh militer kolonial Indonesia TNI-POLRI yang membagi senjata api kepada orang asli Papua Barat. TNI POLRI di wilayah Pengunungan Tengah, khususnya di Wamena dan sekitarnya dituding membagikan senjata untuk menjaga tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia dengan alasan Papua dalam situasi gawat darurat. Pasukan militer sudah berhasil membangun milisi dan sudah melakukan pembagian senjata api.

Pengunggah mengungkapkan juga bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 terdapat laporan bahwa orang asli Papua Barat secara khusus di Pengunungan Tengah dan umumnya Sorong sampai Merauke perlu waspada. KKB Papua Merdeka menyampaikan kepada masyarakat internasional dan nasional khususnya rakyat Papua bahwa Papua akan dijadikan Timor-Timur kedua. KKB Papua

meminta kewaspadaan terhadap segala macam upaya Pemerintah Indonesia melalui TNI-POLRI membujuk rakyat Papua. Berdasarkan rangkaian propaganda tersebut, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan aparat TNI-POLRI.

Propaganda Kemerdekaan sebagai Petunjuk Tuhan

Salah satu propaganda KKB Papua Merdeka dan simpatisan adalah mengungkapkan kemerdekaan sebagai sebuah petunjuk Tuhan seperti dalam unggahan berikut ini.

- (1) Kami tidak Menunggu 1000 Tahun datang untuk Berjuang dan Merdeka, Kami tidak Menunggu 1000 orang percaya, tetapi sebagai petunjuk Guru revolusi dunia Yesus Mengatakan Bahwa: "Ikutlah Aku" Maka tidak ada Kata Terlambat, Mari Bekerja Untuk Menang Selamanya! "Maju Untuk Menang Selamanya" (KNPB Wilayah Katengban: <https://www.facebook.com/wesigin.halitopo>).

Berdasarkan data tersebut diungkapkan bahwa KKB Papua Merdeka mempropagandakan tidak perlu

menunggu 1000 tahun untuk berjuang dan merdeka. KKB Papua Merdeka tidak menunggu 1000 orang Papua percaya. Kemerdekaan Papua dianggap sebagai petunjuk guru revolusi dunia Yesus dengan mengutip ayat. Dalam propaganda ini, KKB Papua Merdeka dan simpatisan menggunakan teknik *glittering generalities*, yang dilakukan dengan kata yang baik dengan melukiskan kemerdekaan sebagai petunjuk Tuhan tanpa memberi ruang masyarakat Papua menyelidiki ketepatan asosiasi itu.

Propaganda Kebebasan Atas Kolonialisme Indonesia di Papua

Salah satu propaganda yang digunakan oleh KKB Papua Merdeka bahwa pemerintah Indonesia sebagai pelaku kolonialisme atau penjajah di Papua, seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) West Papua Di Titik Terakhir Untuk Berdiri Sendiri, Mari Rapatkan Barisan dibawa Undang-Undang dasar Sementara West Papua. Keluarga kita Melanesia, Menyambut Kebebasan Kita Selamanya
[#HidupVanuatu](#) [#WestPapua](#) [#UUDS](#)

Berdasarkan data tersebut terungkap bahwa salah satu propaganda yang digaungkan KKB Papua Merdeka dan

simpatisan dengan menstereotipe negatif tentang pemerintah Indonesia sebagai penjajah atau kolonialis di Papua. Dalam berbagai unggahan, kolonialis atau penjajah sering disematkan dalam penyebutan pemerintah Indonesia. Penyebutan secara terus menerus tentang pemerintah Indonesia sebagai kolonialis di Papua akan dianggap masyarakat Papua sebagai sebuah kebenaran. Penyebutan Indonesia sebagai kolonial merupakan teknik propaganda *name calling* dengan pelabelan buruk terhadap pemerintah Indonesia sebagai penjajah. Pelabelan buruk tersebut berbahaya karena menimbulkan kebencian rakyat Papua terhadap Indonesia, menganggap Indonesia sebagai penjajah, dan Papua bukan bagian dari Indonesia.

Propaganda Membuat UUD Sementara

Berikut ini propaganda bahwa KKB Papua Merdeka telah membuat konstitusi UUDS seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) Tidak ada Organisasi Yang bisa dapat Membuat Undang-Undang, kecuali Lembaga Pemerintah yang diakui oleh Seluruh Lembaga dunia, Itu jelas! United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Mampu

dan suda Membuat UUDS West papua, dan Membawa West Papua Keluar dari Penjajah kolonial Indonesia, Untuk Bebas dan Merdeka Berdaulat Ketengban, West Papua [#ProvisionalGovernment](#) [#Pemerintah](#) [#UUDS](#) [#WestPapua](#) [#Referendum](#)

Berdasarkan data tersebut terungkap propaganda KKB Papua Merdeka bahwa tidak ada organisasi yang dapat membuat Undang-Undang, kecuali lembaga pemerintah yang diakui oleh seluruh lembaga dunia. Dalam hal ini KKB Papua Merdeka mengklaim bahwa Organisasi Papua Merdeka sudah diakui di seluruh lembaga dunia. KKB Papua Merdeka atau dalam hal ini ULMWP mampu dan sudah membuat UUDS West Papua. Menurut KKB Papua Merdeka dengan keberadaan UUDS tersebut untuk membawa West Papua keluar dari penjajah kolonial Indonesia agar bebas dan merdeka berdaulat.

Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka menggunakan teknik *bandwagon*, yakni dengan meyakinkan masyarakat Papua tentang UUD Sementara Papua Merdeka yang telah diakui dunia. Propaganda tersebut merupakan propaganda yang didasari kebohongan

karena fakta sebenarnya tidak seperti yang disampaikan.

Propaganda Militer Melakukan Teror terhadap Tempat Ibadah

Mengaitkan sesuatu dengan agama akan menjadi sesuatu yang sensitif. Hal itu pula yang digunakan pihak KKB Papua Merdeka dengan membuat propaganda bahwa militer (TNI-POLRI) melakukan teror terhadap tempat ibadah, seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) Militer kolonial Indonesia lengkap dengan alat perang meneror warga yang sedang beribadah di gereja pada hari Minggu 14 Pebruari 2021 di Tanah Merah, Boven Digoel Papua. Tidak diperkenankan militer kolonial Indonesia jalan di tempat umum dengan peralatan perang lengkap. Apa lagi masuk dalam gereja. Kecuali di Papua darurat militer. Apapun alasannya, militer kolonial Indonesia tetap salah. <https://www.facebook.com/wesigin.halitopo>

Berdasarkan unggahan tersebut diungkapkan propaganda bahwa militer Indonesia lengkap dengan alat perang meneror warga yang sedang beribadah di gereja pada hari Minggu 14 Pebruari 2021 di Tanah Merah, Boven Digoel

Papua. Menurut KKB Papua Merdeka seharusnya TNI POLRI tidak diperkenankan jalan di tempat umum dengan peralatan perang lengkap apalagi masuk dalam gereja. Aparat TNI-POLRI di tempat umum hanya apabila Papua dalam situasi darurat militer. Menurut KKB Papua Merdeka, apa pun alasannya, militer kolonial Indonesia tetap salah.

Dalam hal ini, propaganda, seperti yang disampaikan oleh KKB Papua Merdeka merupakan pemutarbalikkan fakta. Kebohongan atas fakta yang dipropagandakan terus menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan aparat TNI-Polri.

Propaganda Pendidikan Sekolah Sebagai Pendidikan Kolonial

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah tidak luput menjadi objek propaganda KKB Papua Merdeka seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) West Papua Country Preparatory Committee. Sistem pendidikan kolonial Indonesia yang menghancurkan bangsa Wes Papua.

(Dr. Socrates Yoman, M.A. Ita Waktu Purom, 10 Februari 2021). Sistem atau program pendidikan bangsa kolonial Indonesia yang diterapkan di West Papua selama ini adalah sistem atau program pendidikan yang menindas, memiskinkan, menghancurkan dan membunuh semua nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa dan kearifan lokal yang diberikan TUHAN kepada leluhur bangsa West Papua. Kita diajarkan sejarah dan bahasa serta budaya bangsa kolonial: Pancasila, UUD 1945, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945, lagu Indonesia raya, bendera merah putih, pahlawan-pahlawan asing. Barang-barang asing ini dipaksakan untuk kita terima. (Socrates Yoman, Ita Waktu Purom, 10 Februari 2021).

Berdasarkan data tersebut dapat dimaknai bahwa sistem pendidikan Indonesia dianggap menghancurkan bangsa Papua. Sistem atau program pendidikan bangsa Indonesia yang diterapkan di Papua selama ini adalah sistem atau program pendidikan yang dianggap menindas, memiskinkan, menghancurkan, dan membunuh nilai-nilai budaya, sejarah, bahasa, dan

kearifan lokal yang diberikan Tuhan kepada leluhur bangsa Papua.

Dalam propaganda tersebut juga diungkapkan pandangan negatif terhadap sejarah, bahasa, dan budaya Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945, lagu Indonesia raya, bendera merah putih, dan pahlawan-pahlawan yang dianggap produk kolonial (penjajah). Menurut KKB Papua Merdeka, kurikulum Indonesia dianggap produk asing yang dipaksakan untuk diterima.

Penyebutan kurikulum pendidikan Indonesia sebagai pendidikan kolonial merupakan teknik propaganda *name calling* dengan pelabelan buruk terhadap pemerintah Indonesia sebagai penjajah. Propaganda tersebut akan dapat mengganggu dan merusak sistem pendidikan di Papua.

Propaganda Masyarakat Indonesia Non-Papua Melabeli Masyarakat Papua dengan Monyet/Gorila

Salah satu propaganda yang lantang digaungkan oleh KKB Papua Merdeka adalah propaganda bahwa masyarakat Indonesia dianggap menstigma negatif masyarakat Papua serupa dengan monyet/gorila, seperti propaganda berikut ini.

(1) Kita diajarkan sejarah dan bahasa serta budaya bangsa kolonial: Pancasila, UUD 1945, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945, lagu Indonesia raya, bendera merah putih, pahlawan-pahlawan asing. Barang-barang asing ini dipaksakan untuk kita terima. Lalu, mana sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa West Papua di sekolah-sekolah? Apakah kita manusia-manusia bodoh? Apakah kita ini bukan manusia? Wajarlah kita ini ditempatkan setara dengan binatang oleh bangsa kolonial dengan sebutan "gurila/monyet". Jadi, lebih baik sadarlah, bangkitlah, bersatulah dan LAWAN dengan cara-cara damai dan bermartabat." (Dr. Socrates Yoman, M.A., Ita Wakhui Purom, 10 Februari 2021).

Berdasarkan ungahan tersebut terungkap bahwa adanya propaganda pembiaran masyarakat Papua terhadap pemberian materi/kurikulum sekolah dengan diajarkan sejarah dan bahasa serta budaya bangsa Indonesia yang dianggap kolonial, seperti Pancasila, UUD 1945, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, 17 Agustus 1945, lagu Indonesia raya, bendera merah putih, pahlawan-pahlawan yang dianggap pahlawan

asing. KKB Papua Merdeka mempertanyakan pembiaran itu apakah masyarakat Papua manusia bodoh. Bahkan, pengunggah memprovokasi dan mempertanyakan dengan propaganda apakah masyarakat Papua memang manusia kalau masih tetap membiarkan pola pendidikan Indonesia diberikan kepada anak-anak Papua sebagai pendidikan kolonial. Apabila tetap membiarkan, pengunggah menganggap wajar apabila bangsa Indonesia yang dianggap kolonial menyebut gorila/monyet. KKB Papua Merdeka menuduh dan mempropagandakan bahwa bangsa Indonesia menyebut masyarakat Papua sebagai monyet/gorila. Lagi-lagi apa yang dipropagandakan KKB Papua Merdeka merupakan pemutarbalikkan fakta. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan masyarakat Indonesia.

Propaganda Menolak Produk Hukum Indonesia

Propaganda tuntutan referendum digaungkan oleh KKB Papua Merdeka di media sosial Facebook seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) TERUSKAN..! KE SEMUA Rakyat Negara west papua. 1. Kami menolak semua produk Hukum indonesia di perlakukan di wes papua.... 4. Semua orang west papua Harus Bersatu dan berbaris dibelakang Pemerintahan sementara.

Berdasarkan penggalan unggahan tersebut dipropagandakan untuk diserukan kepada rakyat Papua Barat bahwa menolak semua produk Hukum Indonesia diperlakukan di Papua. Upaya provokasi dan propaganda tersebut berbahaya karena mempengaruhi masyarakat Papua untuk tidak mematuhi hukum yang berlaku. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka menggunakan teknik *name calling* dengan pelabelan buruk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Propaganda Tuntutan Referendum

Propaganda tuntutan referendum digaungkan oleh KKB Papua Merdeka di media sosial Facebook seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) TERUSKAN..! KE SEMUA Rakyat Negara west papua... 2. Kami mendukung 83 Negara yang menuntut indonesia mengizinkan komisaris tingki PBB untuk Hak Asasi manusia masuk ke west papua.

Berdasarkan unggahan tersebut, KKB Papua mempropagandakan bahwa didukung 83 negara yang menuntut komisar tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk masuk ke Papua. Propaganda tersebut merupakan kebohongan yang disebarluaskan oleh KKB Papua Merdeka. Propaganda tersebut berbahaya apabila diterima begitu saja oleh masyarakat Papua tanpa upaya klarifikasi dan konfirmasi.

(2) TERUSKAN..! KE SEMUA Rakyat Negara west papua... 3. Solusi atas penderitaan orang west papua adalah Referendum kemerdekaan; 4. Semua orang west papua Harus Bersatu dan berbaris dibelakang Pemerintahan sementara.

Berdasarkan unggahan tersebut dipropagandakan bahwa solusi atas penderitaan masyarakat Papua adalah referendum kemerdekaan. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus bersatu dan berbaris di belakang pemerintahan sementara bentukan KKB Papua Merdeka. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka menggunakan teknik *bandwagon*, yakni dengan meyakinkan masyarakat Papua tentang tuntutan referendum.

Propaganda Mahasiswa Papua di Daerah ditindas

Pada tahun 2020 terjadi kerusuhan yang disebabkan propaganda bahwa mahasiswa Papua di daerah-daerah di Indonesia (di luar Papua) ditindas, seperti dalam unggahan berikut ini.

(1) *Ini semua kelangsungan otak daripada penjajah RI. untuk membunuh mahasiswa Papua secara licik #Selamatkan mahasiswa Papua di Surabaya sebelum terlambat, Karena cepat atau lambat negara tidak akan memiliki rasa kemanusiaan di Indonesia akan selesai pelan - pelan di Surabaya*

<https://www.facebook.com/Free-west-papua-mellanesia-barat-1421262284839361>

Berdasarkan propaganda tersebut, diungkapkan bahwa beberapa kasus bentrok yang melibatkan mahasiswa Papua dipropagandakan diotaki pemerintah RI yang dinarasikan sebagai penjajah. Bentrokan-bentrokan tersebut untuk membunuh mahasiswa Papua secara licik.

Pengunggah memprovokasikan untuk menyelamatkan mahasiswa Papua di Surabaya sebelum terlambat. Menurut pengunggah cepat atau lambat negara tidak akan memiliki rasa kemanusiaan di Indonesia akan selesai pelan-pelan di Surabaya. Dalam hal ini dinarasikan seolah

mahasiswa Papua di Surabaya akan dibunuh atau dibantai di Surabaya. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan masyarakat Indonesia.

Propaganda Penghentian Otonomi Khusus

Salah satu propaganda lain yang digaungkan KKB Papua Merdeka dan simpatisan Papua Merdeka sebagai berikut.

- (1) "Tuntutan kami ada dua hal, pertama kami minta Otonomi Khusus jilid II dihentikan, dan kedua harus menghentikan rencana pertambangan Blok Wabu. Jika tidak dikabulkan, kami akan terus bergerak. Karena itu adalah perintah dari atasan, Komandan Operasi Umum, tuan Lekagak Telenggen untuk terus melakukan serangan," katanya. <https://jubi.co.id/tpn-pb-intan-jaya-akan-hentikan.../amp/>

Berdasarkan data tersebut terungkap bahwa adanya propaganda penolakan otonomi khusus Jilid II dan penghentian rencana tambang blok Wabu. Apabila tuntutan tidak dikabulkan, KKB Papua Merdeka melakukan serangan. Dalam

hal ini, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis tentang otonomi khusus.

Propaganda Rakyat Papua Disiksa dan TNI/POLRI Melakukan Kekerasan Terhadap Warga Sipil

Salah satu hal yang selalu digaungkan oleh kelompok KKB Papua Merdeka adalah isu pelanggaran HAM seperti penyiksaan terhadap rakyat Papua. Hal itu seperti dalam unggahan berikut ini.

- (1) Inilah kolonial Indonesia di Papua Barat, Melanesia. Kami bukan monyet. Kami adalah orang normal yang ingin bebas. #PapuanLivesMatter Orang Indonesia telah merendahkan, disiksa, diperkosa, disiksa, dibunuh dan dimutilasi lebih dari @DIGITS,000 orang Papua Barat sejak pertama kali menginvasi Papua Barat(<https://www.facebook.com/OnePeopleOneSoul/posts/105794886802335>).

Berdasarkan data tersebut terungkap bahwa adanya propaganda bahwa penjajahan Indonesia di Papua Barat, Melanesia. Orang Indonesia dipropagandakan telah merendahkan, menyiksa, memperkosa, menyiksa,

membunuh dan memutilasi sejak pertama kali menginvasi Papua Barat. Dalam hal ini, KKB Papua Merdeka juga menggunakan teknik propaganda *card stacking*, yakni dengan menggunakan pernyataan yang tidak akurat dan tidak logis yang menyudutkan aparat TNI-Polri.

Dimensi Praktik Wacana (Level Meso)

Menurut Fairclough dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2014: 261) bahwa analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Dalam hal ini juga ditelisik proses yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan-perubahan yang dialami sebelum disebarluaskan. Analisis ini sangat bermanfaat untuk menggali latar belakang sebuah tuturan dan akibat tuturan tersebut.

Unggahan-unggahan di media sosial Facebook jaringan KKB Papua Merdeka dan simpatisan diproduksi secara pribadi oleh masing-masing pemilik akun. Selain itu, apabila muatan propaganda antara akun satu dengan yang lain terlihat berbeda dalam substansi dan kemasan bahasa. Hal itu memberikan gambaran tidak adanya koordinasi yang baik antara pengelola

akun satu dengan akun yang lain. Unggahan-unggahan propaganda tersebut disampaikan secara sporadis, berulang-ulang, dan disampaikan akun-akun fiktif.

Masifnya propaganda KKB Papua Merdeka di media sosial Facebook membuat masyarakat Papua diduga dapat mempercayai isi propaganda tersebut. Terlebih lagi apabila pesan propaganda tersebut dilanjutkan disebarluaskan dengan secara lisan kepada masyarakat pedalaman Papua yang tidak dapat mengakses informasi dan mempercayai propaganda yang disampaikan.

Publik di Papua sulit untuk mengklarifikasi kebenaran sebuah propaganda yang disebarluaskan karena keterbatasan akses informasi. Bahkan, masifnya propaganda tersebut dapat mengesankan representasi suara seluruh masyarakat Papua. Publik luar Papua pun jadi beranggapan bahwa suasana di Papua semua wilayahnya dalam kondisi darurat dan tidak aman. Hal itu memang yang terstigma di masyarakat Indonesia secara umum ketika mendengar kata Papua seketika berpikiran daerah rawan konflik bersenjata, meskipun faktanya hanya

sebagian kecil wilayah Papua yang berkonflik.

Propaganda-propaganda tersebut diproduksi dengan selalu memandang negatif program-program pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Propaganda memandang negatif tindakan terukur aparat TNI POLRI yang bertugas menjaga keamanan. Propaganda yang menempatkan pemerintah Indonesia di Papua sebagai bangsa kolonial, bangsa penjajah sangat berbahaya dalam mempengaruhi alam berpikir masyarakat Papua.

Publik di Papua sulit untuk mengklarifikasi kebenaran sebuah propaganda yang disebarluaskan dan terus menerus disampaikan. Bahkan, masifnya propaganda tersebut mengesankan representasi suara seluruh masyarakat Papua. Publik luar Papua menjadi beranggapan bahwa suasana di Papua semua wilayahnya dalam kondisi darurat dan tidak aman.

Dimensi Praktik Sosial Budaya (Level Makro)

Dalam analisis propaganda KKB Papua Merdeka berdasarkan analisis wacana kritis level mikro dan meso (dimensi tekstual dan dimensi praktik wacana), analisis selanjutnya

berdasarkan sudut pandang sosial budaya masyarakat Papua. Dalam hal ini beragam propaganda yang digaungkan perlu dilihat dari perspektif realita dan sudut pandang sosial budaya masyarakat Papua. Selain itu, memandang persoalan Papua dalam perspektif yang lebih luas sangat diperlukan.

Menanggapi berbagai propaganda tersebut Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih menyebutkan setiap operasi yang dilakukan TNI berkaitan dengan kebijakan politik negara. Wakil Ketua Bidang Hukum Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Abdul Azis mengatakan dalam militer ada beberapa jenis operasi, yakni operasi tempur, operasi keamanan, operasi teritorial dan operasi Pengamanan Perbatasan (Pademme, 2021).

Saat ini yang dilakukan di Papua merupakan operasi teritorial dan Pengamanan Perbatasan. Operasi teritorial adalah merangkul masyarakat untuk membangun daerah bersama. Selanjutnya, operasi pengamanan perbatasan adalah menjaga atau melakukan pengamanan di batas negara Republik Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini. Dalam

pelaksanaan, setiap operasi pasti akan menimbulkan dampak dan itulah yang harus diminimalkan. Operasi baru akan dikatakan berhasil jika dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan (Pademme, 2021). Selanjutnya, Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare mengatakan bahwa pasukan Brimob di Papua ditempatkan di beberapa daerah rawan, seperti Mimika, Puncak, Nduga, dan Intan Jaya (Pademme, 2021). Propaganda yang memandang kehadiran aparat keamanan di Papua terutama Pegunungan Tengah harus dilawan dengan kontrapropaganda bahwa kehadiran aparat keamanan merupakan akibat dari aksi-aksi teror yang dilakukan KKB Papua Merdeka. Kehadiran aparat TNI dengan operasi teritorial justru untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat Papua sebagai warga Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi.

Selanjutnya, berbagai persoalan pendidikan di Papua tidak lepas dari pengaruh aksi teror yang dilakukan oleh KKB Papua Merdeka. Ragam masalah pendidikan di Papua disebabkan kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, minimnya sarana dan prasarana, hingga konflik sosial yang

berdampak pada siswa. Pendidikan bagi masyarakat Papua sangat tertinggal dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Konflik antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masyarakat lainnya tentu memberikan dampak besar terhadap keamanan dan jalannya pendidikan. Dalam hal ini aparat keamanan TNI-POLRI ditempatkan sebagai pihak yang justru menimbulkan terganggunya jalannya pendidikan di Papua.

Seperti digambarkan, terdapat 4 ribu siswa yang sudah 2 tahun 8 bulan di Kabupaten Nduga tidak sekolah karena konflik (“Setumpuk Kendala Pendidikan di Papua yang Dibawa ke Pusat,” 2021). Perlu dilakukan kontrapropaganda dan pemahaman publik bahwa akar permasalahan terletak pada KKB Papua Merdeka yang memaksa aparat TNI-Polri melakukan tindakan pengamanan. KKB Papua Merdekalah yang justru ditempatkan dalam benak publik sebagai akar permasalahan yang terjadi.

Publik Papua harus diberikan pemahaman bahwa bagaimana pemerintah Indonesia dapat melakukan pembangunan fisik dan pendidikan apabila berbagai gangguan keamanan masih saja terjadi. Jadi, kunci untuk pemerataan pembangunan di Papua

adalah peran masyarakat Papua merasa memiliki Indonesia dan berperan menjaga keamanan. Kesenjangan sosial dan alienasi dijadikan propaganda dapat menyulut serta menggiring opini publik bahwa pembebasan Papua dibenarkan dan penyulut gerakan separatis teroris di Papua (Sitorus, Sukabdi, & Novi, 2021:233).

Secara tidak langsung akar permasalahannya adalah KKB Papua sendiri yang terus melakukan aksi teror sehingga suasana keamanan tidak kondusif dan mengganggu kegiatan belajar. Stabilitas keamanan menjadi modal utama pembangunan termasuk pembangunan pendidikan di Papua. Hal itu harus dipahami kepada masyarakat Papua.

Stigmatisasi pemerintah Indonesia sebagai kolonial, penjajah, bagi masyarakat Papua apabila terus dibiarkan dapat mengakar dan sulit dihapuskan. Rasa kebencian terhadap pemerintah Indonesia itulah yang dimanfaatkan KKB Papua Merdeka untuk memberikan penekanan dan pemahaman bahwa aturan hukum Indonesia yang berlaku di Papua harus ditolak dan mengakui UUDS Papua Merdeka. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia,

termasuk aparat keamanan yang bertanggung jawab di Papua.

Selanjutnya, seperti banyak diberitakan, kasus rasis di Surabaya (Widhana, 2019) menjadi momentum bagi KKB Papua Merdeka dengan kejadian pada Senin, 19 Agustus, dua hari setelah Indonesia merayakan kemerdekaannya ke-74. Sederet aksi masyarakat Papua menumpahkan kekecewaan di Jayapura, Manokwari, serta Kota Sorong. Masyarakat Papua menuntut aksi rasialisme terhadap orang Papua harus dihentikan. Aksi pun berlangsung anarkis dengan pembakaran gedung parlemen dan melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga. Dalam konteks kasus ini rangkaian kejadian di Surabaya dan dilanjutkan aksi massa di Papua dapat dipahami sebagai sebuah desain besar yang dimanfaatkan KKB Papua Merdeka.

Berbagai aktivis Papua Merdeka di daerah di Indonesia seperti di Surabaya, Yogyakarta, maupun Semarang seolah sengaja diciptakan untuk memancing kemarahan masyarakat sekitar. Kemarahan warga yang tidak terkendali memancing mengeluarkan ujaran yang bernada rasialis. Hal itulah yang seolah memang dikondisikan untuk membangun opini bahwa Papua

dianggap berbeda dan diperlakukan rasis oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata menghadapi propaganda negatif tersebut.

Setiap ada propaganda negatif terhadap masyarakat Papua perlu segera disusul informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya agar masyarakat Papua tidak termakan isu propaganda. Apabila keberimbangan informasi tidak dilakukan dengan cepat, apa pun propaganda yang digaungkan KKB Papua Merdeka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran.

Mengaitkan sesuatu dengan agama dapat menjadikan sesuatu yang sensitif. Hal itu pula yang digunakan pihak KKB Papua Merdeka dengan membuat propaganda bahwa militer melakukan teror terhadap tempat ibadah. Tindakan militer yang berhubungan dengan tempat ibadah harus lebih hati-hati karena hal itulah yang diinginkan oleh KKB Papua Merdeka. Memainkan isu agama untuk menarik simpati. Berbagai bentrok mahasiswa Papua di daerah dan aksi bernada rasis merupakan akibat atas provokasi simpatisan KKB Papua Merdeka. Fakta yang sesungguhnya justru yang diputarbalikkan seolah

mahasiswa Papua mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan rasis. Masyarakat Papua pun akan menerima propaganda tersebut dengan begitu saja dan mempercayainya.

Penyusupan dan ‘cuci otak’ KKB Papua Merdeka terhadap pemikiran generasi intelektual Papua, dalam hal ini kaum mahasiswa, sangat berbahaya. Kontra propaganda dan pelurusan pemahaman perlu dilakukan terhadap mahasiswa Papua terkait pemikiran kebangsaan. Apabila mencermati berbagai kejadian yang ada seolah mahasiswa Papua ditempatkan KKB Papua Merdeka sebagai agen intelektual. Perang pemikiran terhadap generasi muda terpelajar perlu mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia.

Propaganda kemerdekaan sebagai petunjuk Tuhan juga dilakukan KKB Papua Merdeka. Dalam konteks ini satu hal perlu dipahami bahwa agama merupakan salah satu instrumen pengikat persatuan. Beberapa konflik sosial di daerah di Indonesia dilatarbelakangi perbedaan suku dan agama. Konflik antarsuku yang berbeda, tetapi memiliki latar belakang agama yang sama, relatif lebih mudah untuk diredam. Sebaliknya, konflik antarsuku

sekaligus berbeda agama maka akan sulit untuk meredamnya. Pemahaman yang sama dapat digunakan dalam mencermati persoalan di Papua. Agama mayoritas di Papua berbeda dengan agama mayoritas di Indonesia. Hal itu sedikit banyak menimbulkan kesan berbeda dan menguatkan motivasi berpisah. Perspektif ini sama halnya dengan latar belakang sosial disintegrasi di Timor Timur. Hal itu pulalah dimanfaatkan KKB Papua Merdeka dalam mempropagandakan kemerdekaan kepada masyarakat di Papua. Pendekatan terhadap pemuka adat dan pemuka agama menjadi penting untuk meluruskan propaganda negatif KKB Papua Merdeka.

Dalam hal ini penting membangun pemahaman kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia terhadap tokoh adat dan pemuka agama. Jangan sampai justru sebaliknya, ada tokoh adat maupun tokoh agama yang berdiri di belakang KKB Papua Merdeka. Hal itu tentu sangat berbahaya.

Pemahaman akar permasalahan Papua memang sangat penting dalam perang pemikiran ini. Sejak penggabungan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia selalu diwarnai perdebatan sejarah. Hal

tersebut di atas berakibat pada keluhan-keluhan bersejarah yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia. Selama sejarah integrasi Papua tidak dianalisis secara kritis dan terbuka guna menemukan pemahaman sejarah bersama, keluhan historis tetap terpelihara (Sugandi, 2008).

Kelompok anti-integrasi Papua ke NKRI tetap berpegang dengan sejarah yang diyakininya benar. Latar belakang budaya dan sejarah menjadi dasar upaya untuk merdeka (Djafar, 2012:99). Dasar pemahaman sejarah itulah yang mendasari kelompok KKB Papua Merdeka dan simpatisannya untuk terus melakukan segala cara untuk merdeka. Memang penolakan terhadap masyarakat pendatang sebagai akibat program pemerataan pembangunan dengan transmigrasi banyak terjadi di daerah-daerah. Hanya saja resistensi paling besar terjadi di Papua, tidak seperti yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan yang cenderung dapat berbaur dan berterima dengan masyarakat asli. Resistensi terhadap masyarakat pendatang di Papua secara tidak langsung sebagai akibat beragam propaganda negatif yang digaungkan KKB Papua Merdeka.

Sebenarnya model pembauran masyarakat dan berterima yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan dapat menjadi model pembauran masyarakat di Papua. Selain itu, pembauran balik perlu dilakukan dengan memperbanyak masyarakat Papua untuk hidup dan tinggal di wilayah Indonesia yang lain selain Papua akan membuat orang Papua juga memiliki Indonesia. Jadi, dengan demikian masyarakat Papua tidak hanya berorientasi untuk tinggal di Papua, tetapi juga tinggal di wilayah Indonesia yang lain.

Penghentian pendekatan militer di Papua seolah memberi ruang gerak bagi KKB Papua bertindak sesuka hati melakukan berbagai aksi penembakan, seperti yang masih terjadi sampai saat ini. Teriakan pelanggaran HAM hanya ditujukan pada aksi aparat keamanan saat melakukan tindakan tegas terukur. Sedangkan tuduhan serupa tidak pernah ditujukan kepada KKB Papua Merdeka yang melakukan berbagai aksi pembunuhan terhadap aparat dan masyarakat sipil. Hal itu merupakan standar ganda yang dilakukan aktivis Hak Asasi Manusia dalam memandang konflik Papua. Upaya penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan pemerintah Indonesia

dengan melibatkan semua pihak (Sagita, 2021:12).

Pelaksanaan otonomi khusus di Papua yang diikuti penyaluran dana otonomi khusus yang besar yang dinilai tidak efektif, bisa jadi disebabkan pelaksanaan di daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak dapat menggunakan dana otonomi khusus dengan baik. Raja-raja kecil di Papua dengan mengatasnamakan rakyat Papua demi memperkaya diri sendiri justru perlu diwaspadai. Bisa jadi isu konflik di Papua terus dipelihara untuk terus mempertahankan kontrol atas tanah Papua tanpa mendapat pengawasan yang baik karena masyarakat disibukkan dengan persoalan keamanan. Kontrapemikiran yang dilakukan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivis yang melakukan berbagai penilaian negatif terhadap program dan kebijakan pemerintah Indonesia perlu dilakukan. Oleh karena itu, serangkaian propaganda tersebut harus mendapat kontrapropaganda yang meluruskan pemahaman di masyarakat Papua.

Media massa memiliki peran melakukan kontrapropaganda. Kontrapropaganda dapat dikonstruksi *framing* media yang menegaskan Papua berstatus bagian dari Indonesia sebagai

satu-satunya entitas yang menguasai Papua dilindungi oleh hukum internasional dan mengungkapkan keberpihakan atau sikap politik media (Martianto & Isnaini, 2021:48). Strategi kontrapropaganda dapat dilakukan dengan tujuan yang jelas, berbagai sarana prasarana berupa saluran media massa yang ada baik yang bersifat daring (*online*) maupun luring (*offline*), dengan menganalisis problem kontrapropaganda baik dari sisi konten, permasalahan sumber daya manusia maupun metode kerja dengan pihak-pihak lain (Sadarusalam, Wahyudi, & Mundayat, 2018:41). Berbagai kotrapropaganda dan strategi diharapkan menjadi jawaban atas kesalahpahaman masyarakat Papua akibat propaganda yang terus digaungkan KKB Papua Merdeka.

Hal itu perlu segera dilakukan. Apabila propaganda KKB Papua Merdeka terus dibiarkan upaya penjagaan keamanan di Papua seolah rapuh karena pemikiran yang digerogeti beragam propaganda negatif yang salah, tetapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Menjaga keamanan secara fisik memang penting, menjaga keamanan pemikiran masyarakat Papua justru lebih penting. Pengalaman

lepasnya Timor Timur wajib menjadi pelajaran berharga.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Berdasarkan analisis wacana kritis dapat disimpulkan beragam propaganda yang dilakukan KKB Papua Merdeka, yakni TNI Polri dianggap melakukan operasi secara terbuka, membentuk milisi, menyiksa rakyat Papua, kekerasan terhadap warga sipil, dan meneror tempat ibadah, pelabelan masyarakat Papua dengan kata 'monyet'/'gorila', mahasiswa Papua di daerah ditindas, kemerdekaan dianggap sebagai petunjuk Tuhan untuk membebaskan diri dari kolonialisme Indonesia, upaya memerdekakan diri dengan membuat UUD sementara, menolak produk hukum Indonesia, perlunya desakan dan tuntutan referendum dan penghentian otonomi khusus. Semua propaganda negatif tersebut didasari atas kebohongan KKB Papua Merdeka.

KKB Papua dalam melancarkan propaganda tersebut menggunakan berbagai teknik propaganda, seperti pemutarbalikkan fakta dengan menyudutkan pemerintah Indonesia (*card stacking*), menstereotipe negatif segala hal tentang Indonesia (*name*

calling), menebarkan janji manis dan keyakinan tentang referendum dan kemerdekaan (*glittering generalities* dan *bandwagon*).

Unggahan propaganda diproduksi secara pribadi oleh pemilik akun masing-masing. Unggahan disampaikan secara sporadis, berulang-ulang, dan disampaikan akun-akun fiktif di dalam dan luar negeri. Propaganda diproduksi dengan masif membuat masyarakat Papua percaya, terlebih dilanjutkan propaganda lisan kepada masyarakat pedalaman Papua yang tidak dapat mengakses informasi. Publik akan sulit untuk mengklarifikasi kebenarannya. Masifnya propaganda mengesankan suara seluruh masyarakat Papua. Publik luar Papua beranggapan suasana di Papua dalam kondisi darurat dan tidak aman. Propaganda diproduksi dengan memandang negatif program yang digaungkan oleh pemerintah dan tindakan terukur aparat TNI Polri.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, berbagai propaganda negatif yang digaungkan KKB Papua Merdeka harus mendapat kontrapropaganda untuk meluruskan pemahaman masyarakat Papua. *Kedua*, kontra pemikiran terhadap oknum yang

mengatasnamakan aktivis hak asasi manusia, yang cenderung bersikap dengan standar ganda, perlu dilakukan.

Ketiga, masyarakat Papua harus memiliki kesadaran diri sebagai bagian bangsa Indonesia dengan mencerdaskan diri untuk berkembang seperti daerah lain di Indonesia. *Keempat*, pendekatan sosial kepada masyarakat Papua sebagai bagian Indonesia perlu terus dilakukan. Testimoni dari eks aktivis Papua Merdeka dan tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Papua perlu dipropagandakan.

Kelima, propaganda KKB Papua Merdeka seolah memiliki afiliasi 'senasib' dengan gerakan-gerakan serupa seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Maluku Selatan (RMS) yang juga gencar melakukan propaganda. Propaganda testimoni yang dilakukan oleh simpatisan dari Timor Timur perlu diwaspadai karena memberikan motivasi agar Papua juga merdeka seperti Timor Timur. Papua seolah percobaan kedua setelah sukses memerdekakan Timor Timur. Hal ini perlu segera diantisipasi pemerintah Indonesia dengan langkah konkret.

Keenam, agama berpengaruh sebagai motivasi diri yang diyakini dengan penuh kesucian dan ketaatan. Apabila ditelaah lebih jernih dan

mendalam, pokok dari akar permasalahan disintegrasi di Papua adalah persoalan agama yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah terjadi di Timor Timur. Persoalan agama lebih dari sekadar persoalan kesejahteraan, demografi maupun persoalan lainnya. Oleh karena itu, kesadaran bernegara dan cinta tanah air perlu diresapi oleh para pemuka agama di Papua, baik Kristen, Katolik, Islam, maupun agama lainnya. Sama halnya pemuka adat, pemuka agama lebih didengar dan dipatuhi masyarakat daripada pemerintah dan todongan senjata. Perlu kesadaran untuk bisa hidup berdampingan dalam pangkuan NKRI. Pendekatan humanis dengan pemuka agama di Papua sangatlah diperlukan.

Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2022). Fakta 3 TNI Tewas Ditembak KKB Papua, Diserang Pagi Hari Saat Pergantian Jaga. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/01/28/112108/fakta-3-tni-tewas-ditembak-kkb-papua-diserang-pagi-hari-saat-pergantian-jaga> tanggal 5 Februari 2022.
- Ahmadi F., Y. D. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul "Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan." *Metalingua: Jurnal Penelitian Identifikasi Propaganda Organisasi Papua Merdeka: Upaya Preventif Disintegrasi Bangsa* | Ali Kusno, Sailal Arimi, M. Hafidh Wahidiyas | 41
- Bahasa, 12 (2)(Analisis Wacana Kritis), 253--265.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). Propaganda. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/propaganda> tanggal 23 Juni 2021.
- Costa, F. M. L. (2022). Fasilitas Pendidikan Jadi Sasaran, KKB Bakar Dua Sekolah di Intan Jaya. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/31/fasilitas-pendidikan-jadi-sasaran-kkb-bakar-dua-sekolah-di-intan-jaya> tanggal 3 April 2022.
- Djafar, Z. (2012). Kemerdekaan Papua dan Relevansi Rekasi Tiga Negara. *Jurnal Penelitian Politik, Volume 19*. Diakses dari <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/453>
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan teori, Metodologi, dan Penerapan*. (H. Zaskuri, Ed.) (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Konflik Papua. (2020). Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Papua 26 Februari 2020.
- Kusno, A. (2015). Makna Bahasa Propaganda dalam Wacana (Spanduk dan Baliho) Tuntutan Otonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur (Kajian Semiotik). *Parole, Volume 5 N*. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/parole/article/view/8647#>
- Luncurkan Buku, Freddy Numberi Kritisi Cara Tangani Papua. (2014). Diakses dari <https://www.jpnn.com/news/luncurkan>

- kan-buku-freddy-numberi-kritisi-cara-tangani-papua tanggal 16 Maret 2022.
- Martianto, R. W. U., & Isnaini, M. (2021). Kontra Propaganda Deklarasi Negara Papua Barat dalam Konstruksi Pemberitaan Tempo.co. *Kajian Jurnalisme, Volume 5 N. Diakses dari* <https://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/31885>
- Moleong, L. J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pademme, A. (2021). Operasi militer di Papua, TNI dan Polri: Kami hanya mengikuti perintah. Diakses dari <https://jubi.co.id/operasi-militer-di-papua-tni-dan-polri-kami-hanya-mengikuti-perintah/> tanggal 9 Maret 2022.
- Sadarusalam, B. W. A., Wahyudi, B. W., & Mundayat, A. A. (2018). Strategi Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Perkembangan Radikalisme Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Peperangan Asimetris, Volume 4 N. Diakses dari* <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/295/272>.
- Sagita, D. E. Y. (2021). Konflik Dan Solusi Papua Merdeka Dalam Pemikiran Paul Feyerabend. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, Volume 1 N. Diakses dari* <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/440>.
- Schiffrin, D. (2007). *Ancangan Kajian Wacana*. (Abd. Syukur Ibrahim, Ed.) (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setumpuk Kendala Pendidikan di Papua yang Dibawa ke Pusat. (2021). Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323120356-20-620918/setumpuk-kendala-pendidikan-di-papua-yang-dibawa-ke-pusat> tanggal 9 Maret 2022.
- Sitorus, G. H., Sukabdi, Z., & Novi. (2021). Kesenjangan Sosial Sebagai Akar Propaganda Gerakan Separatis-Terrorisme di Papua. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, Volume 11. Diakses dari* <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1442>.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta. Diakses dari <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=586242>.
- Suwandi, D. (2022). Seorang Prajurit TNI Ditembak KKB di Intan Jaya Papua. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/05/151648578/seorang-prajurit-tni-ditembak-kkb-di-intan-jaya-papua>. tanggal 5 Februari 2022.
- Taher, A. P. (2021). Konflik Berulang di Intan Jaya Papua karena Pendekatan Militeristik. Diakses dari <https://tirto.id/konflik-berulang-di-intan-jaya-papua-karena-pendekatan-militeristika-gaeC>. tanggal 17 Februari 2022.
- Widhana, D. H. (2019). Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua. Diakses dari <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>. tanggal 9 April 2021.
- Zakiyuddin, A. (2018). Teknik-Teknik

Propaganda Politik Jalaludin Rakhmat (Studi kasus pada Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Academia Praja*, Volume 1 N. Diakses dari <http://fisip.unjani.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/Teknik-Teknik-Propaganda-Politik-Jalaludin-Rakhmat-Studi-kasus-pada-Kampanye-Pemilu-2014-di-Kabupaten-Bandung-dan-kabupaten-bandung-barat-Ahmad-Zakiyuddin.pdf>